

Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Participatory Planning*

Gina Puspitasari Rochman^{1*}, Lely Syiddatul Akliyah², Irland Fardani³, Tarlani⁴, Nurcahyo Prabowo⁵

Kata Kunci:

Desa Wisata;
Participatory Planning;
Pendampingan;

Keywords:

Tourism Village;
Participatory Planning;
Mentoring;

Corespondensi Author

¹Perencanaan Wilayah dan Kota,
Universitas Islam Bandung
Email: gina.puspitasari@unisba.ac.id

History Article

Received: 20-10-2023;
Reviewed: 21-11-2023;
Revised: 11-12-2023;
Accepted: 17-12-2023;
Published: 20-12-2023;

Abstrak. Artikel ini menguraikan proses dan hasil kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mitra dalam mengelola desa wisata, khususnya dalam proses merencanakan pengembangan desa wisata. Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan *participatory planning* melalui metode pemetaan potensi dan masalah, serta *focus group discussion* (FGD). Sementara itu, perumusan strategi pengembangan menggunakan metode analisis SWOT. Kegiatan ini mampu mendorong peningkatan pengetahuan dan pengalaman mitra dalam memahami potensi dan masalah desa, serta merencanakan pengembangan desa wisata di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan strategi pengembangan desa wisata yang telah disepakati bersama para pemangku kepentingan terkait sektor pariwisata di tingkat desa.

Abstract. This article describes the process and results of community service activities that aim to increase the capacity of partners in managing tourist villages, especially in the process of planning the development of tourist villages. The service activity uses a *participatory planning* approach through the method of mapping potential and problems, as well as *focus group discussions* (FGDs). Meanwhile, the formulation of development strategies uses the SWOT analysis method. This activity was able to encourage an increase in the knowledge and experience of partners in understanding the potential and problems of the village, as well as planning the development of tourism villages in the future. In addition, this activity produced a tourism village development strategy that has been agreed upon with stakeholders related to the tourism sector at the village level.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License



PENDAHULUAN

Industri pariwisata menjadi mesin penggerak perekonomian bukan hanya

negara, tapi juga hingga ke tingkat desa. Pariwisata mencakup rangkaian aktivitas dan layanan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau kelompok yang

meninggalkan tempat asalnya ke tempat lain dengan tujuan beristirahat, belajar maupun kepentingan lainnya sementara waktu (Hasanuddin, 2019; Pranata, 2012). Destinasi atau tujuan wisata dapat berupa objek wisata alam, wisata edukasi, atraksi wisata budidaya, dan lain sebagainya. Desa memiliki keunikan atau ciri khas budaya dan kondisi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata dengan didukung sarana dan prasarana (Zakaria et al., 2014). Saat ini, pemerintah pusat dan daerah tengah mendorong pengembangan desa wisata untuk meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan ketahanan nasional (Prihatiningtyas, 2021).

Kabupaten Bandung menetapkan 10 (sepuluh) desa wisata untuk mendorong perekonomian lokal sejak tahun 2011. Desa Lamajang menjadi salah satu desa wisata tersebut dengan keunikan budaya dan kekayaan alamnya. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018-2025, desa ini termasuk ke dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPP) yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan/ekologi (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, 2019). Sebagai desa mitra Universitas Islam Bandung (UNISBA), pengembangan desa wisata lamajang mendapat dukungan kebijakan untuk pengembangan wisatanya di tingkat lokal dan kabupaten.

Sebagai desa wisata, desa ini menawarkan wisata interaktif dan unik, serta mampu memberikan pengalaman otentik dan proses pembelajaran bagi wisatawan. Masyarakat lokal masih memelihara adat istiadat, seperti adanya ritual atau upacara adat Hajat Wuku Tawun, Hajat Solokan, dan Hajat Lembur (Rochman et al., 2020). Selain itu, terdapat situs – situs budaya atau simbol adat, serta kesenian yang masih dipelihara, seperti rumah adat cikondang, barang pusaka, naskah, makam, seni pencak silat, karinding, dan beluk. Semua budaya tersebut dilestarikan oleh pemangku adat dan masyarakat di desa tersebut secara turun-temurun.

Hasil temuan pengabdian menunjukkan bahwa tata kelola desa wisata Lamajang tidak berkelanjutan. Pada tahun 2017, pergantian

kepemimpinan di desa menghentikan keberlanjutan aktivitas wisata sehingga kegiatan wisata sempat berhenti. Kondisi ini diperparah juga dengan kondisi pandemi covid-19 yang menutup semua kegiatan wisata dan membatasi aktivitas masyarakat. Pada akhir 2021, lembaga pengelola desa wisata lamajang diaktifkan kembali dan tengah membangun sistem pengelolaan, serta mulai mewacanakan merumuskan master plan desa wisata. Berkaitan dengan hal tersebut, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman lembaga pengelola desa wisata dalam menyusun rencana pengembangan desa wisata menjadi salah satu kendala. Saat ini, pengurus lembaga tengah melakukan studi banding untuk mendapatkan pengalaman dari desa – desa lain yang berhasil mengembangkan desa wisata. Namun, dalam implementasinya lembaga pengelola membutuhkan pendampingan dalam penyusunan rencana tersebut. Untuk itu, studi ini menguraikan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama pengelola desa wisata dalam merumuskan strategi pengembangan desa wisata secara partisipasi.

Dalam konteks pembangunan pariwisata, pariwisata berbasis komunitas atau *community based tourism* (CBT) merupakan konsep yang menekankan pada keikutsertaan masyarakat lokal secara aktif dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata, baik jangka pendek maupun panjang (Dangi & Petrick, 2021; Giampiccoli & Saayman, 2018). Masyarakat bukan lagi sebagai objek, tapi juga sebagai subjek (Rudolfus Sawu & Pramita Sugiarti, 2020). Penerapan pariwisata berbasis komunitas (CBT) mampu mendorong peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan melalui adanya partisipasi dan pemberdayaan komunitas (Khartishvili et al., 2020). Keberhasilan penggunaan konsep CBT ditunjukkan melalui elemen partisipasi masyarakat, interaksi dan kemitraan diantara para pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar komunitas, distribusi manfaat dan kualitas hidup masyarakat, manajemen dan kepemimpinan, konservasi sumber daya pariwisata, kepuasan wisatawan, serta skala pengembangan pariwisata (Goodwin & Santilli, 2009; Vajirakachorn, 2011; Zielinski et al., 2021). Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pengabdian

berupaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian pengelola desa wisata serta para pemangku kepentingan terkait sebagai bagian dari masyarakat desa untuk merencanakan sendiri pengembangan desa wisatanya. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan *output* berupa peta potensi dan masalah desa wisata, serta strategi pengembangan desa wisata Lamajang.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *participatory planning* dimana tim melakukan kajian penilaian desa secara partisipatif untuk menentukan dan memutuskan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan desa wisata (Chambers, 1994; Waniganeththi, 2017). Berdasarkan hasil diskusi dengan perwakilan masyarakat, tim pengabdian dan mitra bersepakat bahwa penyusunan rencana pembangunan desa wisata secara partisipasi dibutuhkan. Tim pengabdian berperan sebagai fasilitator/pendamping dan mitra aktif ikut serta sejak tahap pengusulan kegiatan pengabdian masyarakat ini hingga evaluasi kegiatan. Untuk mencapai keberdayaan masyarakat, metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pemetaan sosial (*social mapping*), FGD dan workshop. Pemetaan sosial bertujuan untuk memahami karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat di desa wisata Lamajang. Pemetaan sosial sudah dilakukan pada proses penelitian sebelumnya, tetapi pada kegiatan PKM ini, data dan informasi akan diperbaharui dan dilakukan secara partisipatif. Skema kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, meliputi tiga tahapan pemberdayaan, yaitu: 1) meningkat pengetahuan dan pengalaman mitra; 2) meningkat keterampilan mitra; dan 3) meningkat keberdayaan/kemandirian mitra.

Pemetaan sosial bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat (Moliner et al., 2017). Pada kegiatan ini, pengabdian mendapatkan informasi mengenai kondisi sosial dan budaya masyarakat sekitar yang terpetakan secara spasial dan menyeluruh, meliputi aktor-aktor yang ikut terlibat, jaringan sosial, potensi alam, kegiatan

ekonomi masyarakat, seni dan budaya, infrastruktur, serta sarana prasarana pariwisata. Pemetaan sosial dilakukan dalam bentuk kegiatan workshop. Pada kegiatan ini mitra mendapatkan edukasi mengenai prinsip dan elemen penting dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, mitra dilatih dan didampingi secara berkelompok untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyepakati potensi dan masalah pengembangan desa wisata di desanya.

Sementara itu, pada kegiatan FGD, peserta menyampaikan gagasan secara aktif mengenai strategi pengembangan desa wisata lamajang, serta institusi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi tersebut. FGD juga digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan spesifik melalui diskusi kelompok secara sistematis (Prasetya, 2006). Kegiatan FGD melibatkan diantaranya: pengurus lembaga pengelola desa wisata, perwakilan dari lembaga/institusi terkait (seperti perangkat desa, lembaga desa, karang taruna), dan tokoh masyarakat.

Pada akhir kegiatan, tim pengabdian mengevaluasi kegiatan dengan menyebarkan angket kepada mitra untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pengabdian bermanfaat bagi mitra, terutama dalam hal peningkatan pengetahuan dan pengalaman mereka. Selain itu, tim pengabdian juga berdiskusi dengan mitra untuk mendiskusikan rencana tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini sehingga kegiatan pengabdian dapat bermanfaat jangka panjang dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian telah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan meliputi survei partisipatif, workshop pemetaan sosial, dan FGD. Kegiatan workshop dan pemetaan sosial dihadiri 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari kepala desa dan jajarannya yang terkait dengan pengembangan desa wisata (yakni: Ketua Badan Permusyawaratan Desa/BPD, Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa/LPMD, pengelola Badan Usaha Milik Desa/BUMDes), serta ketua dan pengurus pengelola desa wisata yang di dalamnya merupakan perwakilan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/PKK, Gabungan

Kelompok Tani/Gapoktan, Karang Taruna, dst). Pada seluruh kegiatan, peserta aktif memberikan informasi dan gagasan.

Mitra secara partisipatif memetakan potensi dan permasalahan desanya sebagai desa wisata. Peserta workshop sebanyak 30 orang dibagi menjadi 5 kelompok. Pada kegiatan workshop, mitra diberikan edukasi mengenai elemen penting dalam pengembangan desa wisata, selanjutnya dilaksanakan kegiatan pemetaan sosial sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1. Berdasarkan hasil analisis terhadap angket yang disebarkan kepada mitra, kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya dalam memetakan potensi dan masalah desanya dan menyadari bahwa desanya sangat berpotensi menjadi desa wisata yang unggul. Kondisi tersebut mendorong penguatan tata kelola desa wisata lamajang. Selain itu, kegiatan workshop ini telah meningkatkan kesadaran mitra untuk berpartisipasi aktif dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam kegiatan – kegiatan pengembangan desa wisata Lamajang.

Pada gambar 1 dapat dilihat proses pemetaan potensi dan masalah berbasis

spasial yang melibatkan seluruh peserta dengan didampingi oleh fasilitator. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran mitra mengenai potensi wisata yang dapat masyarakat kembangkan dan masalah yang harus diatasi bersama dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, peserta berdiskusi dan menyepakati bersama potensi dan masalah dalam pengembangan desa wisata Lamajang. Kemudian, gambar 2 merupakan hasil akhir dari pemetaan potensi dan masalah yang sudah disepakati bersama dan menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengembangan. Kegiatan ini mampu menggali potensi pengembangan destinasi dan atraksi wisata di masyarakat yang sebelumnya belum tereksplorasi.

Secara umum, Desa Lamajang memiliki potensi wisata yang beragam, baik itu potensi atraksi budaya, alam, maupun buatan. Namun, potensi ini belum dikelola secara optimal. Terdapat beberapa permasalahan infrastruktur, terutama jalan dan fasilitas pendukung wisata masih terbatas, dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan penciptaan inovasi, sebagaimana diuraikan pada tabel 1 dan 2.



Gambar 1: Pemetaan Potensi dan Masalah secara Partisipatif & **Gambar 2:** FGD Potensi dan Masalah

Tabel 1 menguraikan kekuatan dan kelemahan internal desa wisata lamajang. Tabel 2 menguraikan peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal pengembangan desa wisata lamajang. Selanjutnya, simpulan pemetaan potensi, masalah, peluang, dan ancaman menjadi input untuk didiskusikan lebih lanjut pada kegiatan FGD. Secara umum, potensi wisata Desa Lamajang sangat besar dan beragam, terutama wisata budaya

dan alam. Sementara, wisata berbasis pertanian dan kewirausahaan masyarakat berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi dan/atau atraksi wisata baru. Selanjutnya, kelemahan desa ini berhubungan dengan keterbatasan keterampilan sumber daya manusia, inovasi, infrastruktur, dan tata kelola wisata yang mana belum adanya rencana pengembangan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan

Tabel 1: Faktor Internal – Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Memiliki potensi dan atraksi wisata yang beragam, baik budaya, alam, dan buatan	Belum ada inovasi dalam pengembangan, pengelolaan desa wisata (misal paket wisata)
Memiliki kampung adat yang menjadi ciri khas desa	Terbatasnya keterampilan SDM di bidang wisata
Rasa kekeluargaan antar masyarakat yang tinggi dan masyarakat masih memelihara adat istiadat	Sistem informasi belum terintegrasi secara digital dan tidak ada rambu menuju desa wisata
Komoditas unggulan, seperti kopi dan sayur mayur	Kurangnya pemberdayaan masyarakat
Terdapat UMKM kerajinan dan kesenian	Angkutan wisatawan belum ada dan akses jalan yang rusak
Lahan pertanian luas dan kegiatan peternakan	Belum adanya komitmen dan kolaborasi antar aktor, serta rencana pengembangan yang terintegrasi

sumber: diolah dari hasil FGD, 2022

Peluang desa ini untuk berkembang cukup besar melalui adanya inisiasi kolaborasi dengan akademisi dan antar lembaga pemerintah, serta dukungan kebijakan nasional dan daerah untuk mengembangkan Desa Lamajang sebagai desa wisata. Selain itu, perkembangan sistem informasi dan teknologi berpeluang membuka

akses dan menjangkau wisatawan yang lebih luas. Sementara itu, kondisi desa yang rawan longsor dan perkembangan keragaman jenis atraksi wisata dapat mengancam perkembangan desa ini apabila tidak menyiapkan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan yang ada.

Tabel 2: Faktor Eksternal – Peluang dan Ancaman

Peluang (O)	Ancaman (T)
Sudah ada kolaborasi dengan akademisi	Rawan bencana longsor
Perkembangan sistem informasi dan teknologi	Berkembang beragam jenis dan atraksi wisata (seperti: virtual, glamping, dsb)
Sudah ada kerjasama dengan pemda kabupaten untuk pengembangan wisata	Terdapat 50 desa wisata yang akan dikembangkan di Kab. Bandung
Kebijakan nasional mendukung pengembangan desa wisata	

sumber: diolah dari hasil FGD, 2022

Pada kegiatan FGD, mitra bersama tim berdiskusi mengenai strategi untuk mengembangkan desa wisata lamajang berdasarkan pemetaan yang sebelumnya telah dilakukan. Tim pengabdian menggali usulan strategi pengembangan desa wisata Lamajang berdasarkan diskusi kelompok. Mitra mengusulkan beberapa strategi yang

kemudian disandingkan dengan hasil kajian akademis yang dilakukan oleh tim pengabdian. Usulan strategi dari mitra maupun hasil kajian akademis saling memperkaya hasil satu sama lain yang pada dasarnya memiliki kesamaan. Beberapa usulan strategi tersebut, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3: Persandingan Usulan Strategi Mitra dan Kajian Akademik

Usulan Strategi Mitra	Usulan Strategi Hasil Kajian Akademik
Mengembangkan pariwisata dengan konsep pertanian	Merancang alternatif paket wisata, baik wisata budaya maupun alam
Membuat sekolah alam sebagai atraksi wisata baru	Mengembangkan atraksi alam, edukasi, dan pertanian
Membangun infrastruktur pendukung (termasuk pusat informasi)	Memperbaiki kondisi jaringan jalan menuju lokasi – lokasi wisata,
Memitigasi bencana	Membangun infrastruktur dan penyuluhan mitigasi bencana
Mengembangkan dan memasarkan UMKM di bidang kuliner	Memetakan dan mengembangkan usaha masyarakat yang mendukung aktivitas wisata, seperti homestay, catering/kuliner, dan lainnya
Meningkatkan kapasitas SDM, kesadaran wisata dan pelatihan khusus	Meningkatkan kemampuan entrepreneurship dan kesadaran wisata dari masyarakat sekitar lokasi wisata
Meningkatkan ekonomi kreatif	Mengembangkan produk khas desa sebagai cindramata bagi wisatawan
Memangkas sentralisasi kebijakan terkait program pengembangan desa wisata	Memetakan dan membagi peran dan fungsi lembaga terkait wisata, serta mengoptimalkan sistem desentralisasi
Bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengembangkan desa wisata	Menjalin kemitraan antara pengelola wisata dengan lembaga internal desa dan eksternal terkait.

sumber: diolah dari hasil FGD, 2022

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3, mitra sudah mampu merumuskan strategi pengembangan desa wisata. Mitra mengusulkan pembangunan atraksi baru berbasis pertanian dan alam, serta didukung dengan infrastruktur dan penciptaan UMKM terkait wisata. Peningkatan kapasitas SDM di sektor pariwisata, sistem pengelolaan yang terdesentralisasi, serta optimalisasi fungsi BUMDES menjadi perhatian mitra untuk dilakukan perbaikan ke depannya. Dengan demikian, untuk mewujudkan Desa Wisata Lamajang Maju dan Berkelanjutan, maka rumusan kebijakan dan strategi yang merupakan hasil kesepakatan bersama mitra, antara lain:

1. Kebijakan 1: menciptakan inovasi wisata yang didukung infrastruktur yang terintegrasi. Strategi kebijakan tersebut, sebagai berikut:
 - a. Membangun keunikan dan identitas (*branding*) desa wisata;
 - b. Merancang alternatif paket wisata budaya dan alam;
 - c. Menciptakan dan mengembangkan atraksi baru berbasis alam dan pertanian;

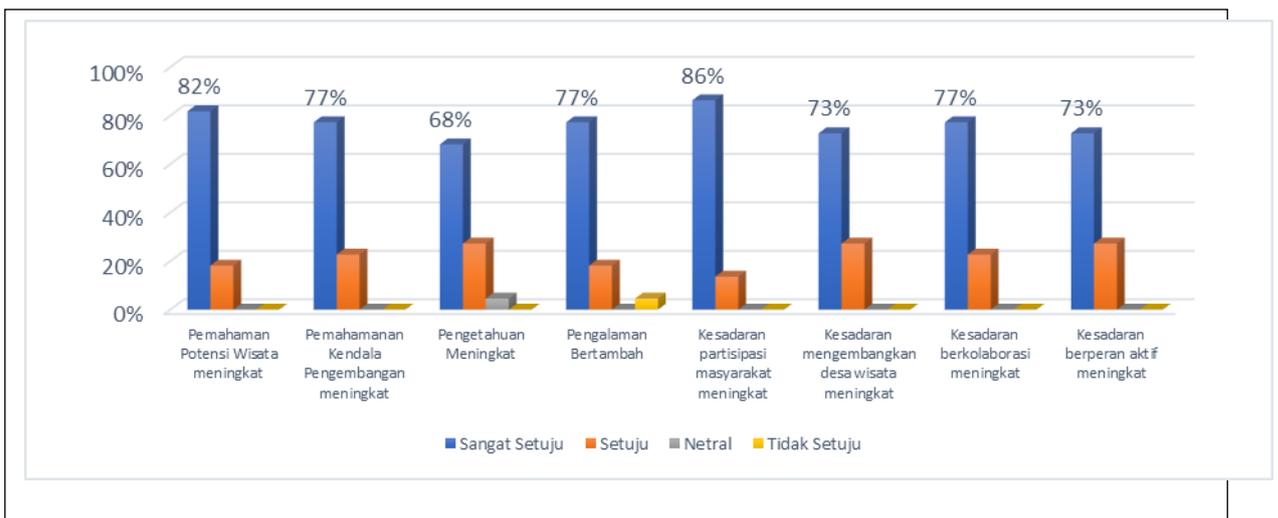
- d. Meningkatkan aksesibilitas menuju lokasi atraksi wisata, baik jaringan jalan, angkutan, maupun sistem informasi;
 - e. Membangun dan mengelola infrastruktur mitigasi bencana.
2. Kebijakan 2: membangun usaha masyarakat berbasis kelompok yang terintegrasi dengan aktivitas wisata. Strategi kebijakan tersebut, sebagai berikut:
 - a. Membentuk dan mengembangkan kelompok usaha masyarakat pendukung wisata;
 - b. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan kesadaran wisata masyarakat;
 - c. Mengembangkan sistem pemasaran yang inovatif dan berbasis digital.
 3. Kebijakan 3: penguatan dan integrasi elemen – elemen wisata. Strategi kebijakan tersebut, sebagai berikut:
 - a. Mendorong peningkatan pariwisata masyarakat, koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait sektor pariwisata;

- b. Mengintegrasikan kelompok wisata dan usaha masyarakat ke dalam paket wisata.
4. Kebijakan 4: mengembangkan produk wisata, ekonomi kreatif, serta sistem informasi dan promosi yang terintegrasi. Strategi kebijakan tersebut, sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan produk wisata kekhasan desa;
 - b. Membangun sistem informasi dan pengelolaan berbasis digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.
5. Kebijakan 5: mengintegrasikan lembaga dan memperkuat sistem pengelolaan desa wisata. Strategi kebijakan tersebut, sebagai berikut:
 - a. Mengoptimalkan dan menguatkan peran dan fungsi lembaga terkait wisata;
 - b. Menjalin kemitraan antara pengelola wisata dengan lembaga desa (seperti BUMDES, dsb);
 - c. Menjadi kemitraan dengan lembaga eksternal dan bisnis untuk mengakselerasi pengembangan desa wisata.

Rumusan kebijakan dan strategi tersebut merupakan hasil pendampingan tim pengabdian yang telah disepakati bersama oleh

mitra bersama unsur perwakilan masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian ini, masyarakat, khususnya mitra telah meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam merumuskan rencana pengembangan desa wisata. Ke depan, mitra diharapkan mampu merumuskan sendiri perencanaan desa mereka secara mandiri di masa mendatang. Selanjutnya, strategi tersebut perlu dijabarkan ke dalam program yang disepakati bersama dengan para pemangku kepentingan atau institusi/lembaga yang berwenang.

Berdasarkan hasil kuesioner, gambar 4 menunjukkan bahwa 68 persen peserta program menyatakan sangat setuju dan 27 persen menyatakan setuju bahwa kegiatan PKM ini mampu meningkatkan pengetahuan mitra mengenai desa wisata. Sementara, gambar 5 menunjukkan 82 persen menyatakan sangat setuju dan 18 persen menyatakan setuju bahwa pengetahuan peserta meningkat mengenai potensi wisata di desanya. Maka, kami menyimpulkan bahwa PKM ini berhasil meningkatkan pengetahuan mitra. Selanjutnya, pengalaman mitra dalam merencanakan desa wisata meningkat. Lebih lanjut, kesadaran mitra untuk berperan aktif dan berkolaborasi dalam pengembangan desa wisata meningkat setelah dilaksanakannya PKM ini.



Gambar 4: Peningkatan Pengetahuan dan Pengalaman mengenai Perencanaan Desa Wisata

Pengelolaan desa wisata yang tepat sangat penting dalam pembangunan desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan (Goodwin & Santilli, 2009; Sugiyama, 2019). Sistem pengelolaan desa wisata mencakup perencanaan dan pengembangan atraksi

wisata dan fasilitas pendukung, pengadaan dana pengelolaan, promosi wisata, dan sumber daya manusia yang mumpuni (seperti pemandu wisata, *tour operator*, *tourist information center*, dsb). Dalam hal ini, unsur tata kelola dan kemandirian masyarakat

dalam membangun desa sangat penting. Pada akhirnya, pembangunan desa wisata oleh dan untuk masyarakat lokal sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai (Giampiccoli & Saayman, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Perencanaan desa wisata secara partisipatif (*participatory planning*) mendorong pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama dalam menentukan arah pembangunan desa mereka. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan *output* berupa strategi pengembangan desa wisata, dan *outcome* berupa peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pengalaman mitra dalam merencanakan desa wisata. Proses perencanaan menggunakan metode pemetaan potensi dan masalah, serta FGD yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat sehingga kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan desanya sendiri sebagai bagian dari proses membangun desa wisata yang berkelanjutan. Rencana tersebut mencakup aspek ekonomi, kelembagaan, sosial, dan infrastruktur. Rencana yang telah dihasilkan telah disepakati oleh berbagai pihak. Perencanaan dan pengembangan desa wisata secara partisipatif dapat meningkatkan kepercayaan, kepemilikan, dan penerimaan oleh masyarakat sehingga rencana dapat diimplementasikan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung (UNISBA).

DAFTAR RUJUKAN

- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454.
- Dangi, T. B., & Petrick, J. F. (2021). Enhancing the role of tourism governance to improve collaborative participation, responsiveness, representation and inclusion for sustainable community-based tourism: a case study. *International Journal of Tourism Cities*. <https://doi.org/10.1108/IJTC-10-2020-0223/FULL/HTML>
- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model and community participation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 7(4), 1–27.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community-based tourism: A success. *ICRT Occasional Paper*, 1–37.
- Hasanuddin, M. (2019). Analisis Fasilitas Pariwisata Di Museum Angkut Kota Batu Bagi Pengunjung Penyandang Disabilitas [Universitas Brawijaya]. In *Doctoral dissertation* (Vol. 72, Issue 2).
- Khartishvili, L., Mitrofanenko, T., Muhar, A., & Penker, M. (2020). Issues with Applying the Concept of Community-Based Tourism in the Caucasus. *Mountain Research and Development*, 40(1), R11.
- Moliner, O., Sales, A., & Sanahuja, A. (2017). Social mapping in the context of a community-build day: Strategy to strengthen links with community in a small rural school. *Procedia-Social and Behavioral*, 237, 305–310.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 - 2025, (2019).
- Pranata, Y. (2012). *PENGARUH DAYA TARIK WISATA TERHADAP MOTIVASI WISATAWAN DOMESTIK UNTUK BERKUNJUNG KE TAMAN WISATA TIRTA ALAM CIBINONG - SAGALAHERANG, KABUPATEN SUBANG*. 7–21.
- Prasetya, I. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu - Ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Administrasi.
- Prihatiningtyas, A. (2021). *ANALISIS PEMETAAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN DESA WISATA (Studi pada Desa Wisata Gerduren Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas)*.

- Rochman, G. P., Odah, Chofyan, I., & Sakti, F. (2020). Understanding the smart society in rural development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 447(1), 012016. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012016>
- Rudolfus Sawu, M., & Pramita Sugiarti, D. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Community Based Tourism di Desa Wisata Waturaka, Kabupaten Ende. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8(1), 119. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2020.v08.i01.p16>
- Vajirakachorn, T. (2011). *Determinants of success for community-based tourism: The case of floating markets in Thailand*. Texas A&M University.
- Waniganeththi, G. (2017). *Role of Participatory Rural Appraisal (PRA) Tools and Techniques for Rural Development Planning*.
- Zakaria, F., Suprihardjo, D., Perencanaan, J., & Teknik, F. (2014). *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*. 3(2).
- Zielinski, S., Jeong, Y., & Geographies, C. M. (2021). Factors that influence community-based tourism (CBT) in developing and developed countries. *Taylor & Francis*, 23(5-6), 1040-1072. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1786156>